



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Gedung E Lantai 4
Jalan dr. Wahidin Nomor 2
Jakarta 10710, Kotak Pos 21

Telepon (021) 3449230 Pes. 6288, 3812258
Faksimile (021) 3812727
Website www.depkeu.go.id.

Yth. 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Para Sekretaris Badan;
4. Para Kepala Biro/Pusat/Sekretaris Pengadilan Pajak
pada Sekretariat Jenderal;
1 s.d. 4 di lingkungan Departemen Keuangan
Jakarta

18 Februari 2008

SURAT EDARAN
Nomor: SE- 145 /SJ/2008

Tentang

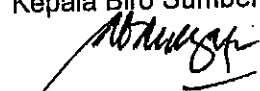
**Kelengkapan Dokumen dalam Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pensiun,
Perceraian, Ralat Nama/ Tahun Kelahiran dan Cuti DI luar Tanggungan Negara**

Dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan dan mempercepat proses penyelesaian permasalahan di bidang kepegawaian, diharapkan perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian usul dari unit kepada Menteri Keuangan / Sekretaris Jenderal / Kepala Biro Sumber Daya Manusia supaya dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dalam lampiran Surat Edaran ini.
2. Apabila dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan lampiran Surat Edaran ini, maka Biro Sumber Daya Manusia akan mengembalikan usul tersebut kepada unit terkait untuk dilengkapi dan dikirimkan kembali kepada kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Sumber Daya Manusia


Abdul Gofar
NIP 060043776

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal

KELENGKAPAN DOKUMEN YANG HARUS DIPENUHI

NO.	USUL	KELENGKAPAN	KETERANGAN
1.	Pemberhentian Tidak Dengan Peraturan Hormat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	a. Usul unit b. SK Pangkat terakhir c. LBKP minimal 6 bulan berturut-turut d. Surat Peringatan/ Panggilan e. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) f. Surat pernyataan atasan bahwa yang bersangkutan tidak hadir	LBKP dimaksud adalah yang mencantumkan nama yang bersangkutan. Dihitung sejak tanggal yang bersangkutan tidak masuk kantor sampai usul disampaikan ke Menteri Keuangan
2.	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri/ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980	a. Usul unit b. SK Pangkat terakhir c. Surat Perintah untuk melakukan Pemeriksaan d. BAP dan LHP Inspektorat Jenderal	
3.	Keberatan atas Keputusan penajutan hukuman disiplin oleh Pimpinan Unit Eselon I	a. Surat keberatan yang bersangkutan b. Tanggapan dari pimpinan Unit Eselon I c. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan d. BAP dan LHP unit eselon I e. Surat Keputusan penajutan hukuman disiplin f. Tanda terima penyampaian SK penajutan hukuman disiplin	
4.	Keberatan atas disiplin penajutan hukuman disiplin berupa pemberhentian	a. Surat keberatan yang bersangkutan b. Tanggapan dari pimpinan unit eselon I c. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan d. BAP dan LHP dari Inspektorat Jenderal	

		<ul style="list-style-type: none"> e. Tanda terima penyampaian SK penjatihan hukuman disiplin f. Surat keterangan dari atasan yang bersangkutan : <ul style="list-style-type: none"> - apakah yang bersangkutan masih aktif bekerja - apakah gaji masih dibayarkan - apakah yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman disiplin/ pidana - apakah yang bersangkutan masih dapat dibina 	
5.	Pembertentian Sementara dari Jabatan Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966	<ul style="list-style-type: none"> a. Usul Unit b. Surat perintah penahanan dari pihak berwajib c. SK Pangkat terakhir 	
6.	Pengakhiran Sementara dari Jabatan Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966	<ul style="list-style-type: none"> a. Usul unit b. Surat perintah penahanan dari pihak berwajib c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht) 	
7.	Penjatihan hukuman disiplin yang merupakan wewenang Sekretaris Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> a. Usul dari pimpinan unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal b. SK Pangkat terakhir c. BAP dan LHP dari atasan masing-masing d. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan 	
8	Pembertentian sebagai CPNS PP 11/ 2002	<ul style="list-style-type: none"> a. Usul unit b. SK CPNS c. BAP/ LHP d. Putusan Pengadilan e. LBKP f. Peringatan/ Panggilan g. Surat keterangan tidak lulus prajabatan 	<p>Pemalsuan data Yang terkena kasus pidana Ketidakhadiran Bagi yang tidak lulus</p>

9.	Pensiun pegawai memenuhi syarat usia dan masa kerja pensiun 50-20	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan pensiun PNS yang bersangkutan b. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS) c. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama Model A (SP4A) d. SK Jabatan e. 5 (lima) lembar pas photo hitam putih, tanpa tutup kepala ukuran 4 x 6 cm f. Foto copy surat keputusan pengangkatan pertama sebagai PNS g. Foto copy surat keputusan kenaikan pangkat dan gaji pokok terakhir h. Foto copy daftar susunan keluarga, surat nikah dan akte kelahiran anak kandung <p>Bagi yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan II dan jabatan fungsional</p>
10.	Pensiun pegawai karena uzur jasmani/ rohani	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan pensiun PNS yang bersangkutan b. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS) c. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama model A (SP4A) d. Hasil pengujian kesehatan oleh tim penguji kesehatan PNS e. 5 (lima) lembar pas photo hitam putih, tanpa tutup kepala ukuran 4 x 6 cm f. Foto copy surat keputusan pengangkatan pertama sebagai PNS g. Foto copy surat keputusan kenaikan pangkat dan gaji pokok terakhir h. Foto copy daftar susunan keluarga, suratnikah dan akte kelahiran anak kandung
11.	Pembertentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS Tanpa Hak Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> a. Usul unit b. Permohonan yang bersangkutan c. SK Harian/ Bulanan/ CPNS

		<ul style="list-style-type: none"> d. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS) e. Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP) 	Bagi yang ikatan dinas
12.	Izin cerai	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan izin cerai yang bersangkutan b. Usul unit c. Surat Keterangan Lurah yang diketahui serendah-rendahnya oleh Camat d. Surat putusan pengadilan e. Visum et repertum dari dokter pemerintah f. Surat keterangan dokter/ polisi g. Surat keterangan dari 2 orang saksi yang telah dewasa yang diketahui oleh Camat h. Putusan Pengadilan i. Pernyataan minimal 2 orang saksi dewasa yang melihat perzinahan dan diketahui oleh Camat j. Laporan tertulis dari salah satu pihak (suami/isteri) yang mengetahui perzinahan k. BAP 	<ul style="list-style-type: none"> - Alasan pertengkaran - Suami/ isteri meninggalkan pasangannya lebih dari 2 (dua) tahun berturut- turut Suami/ isteri ditahan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Salah satu pihak pemabuk/ pemadat/ penjudi Perzinahan
13.	Surat keterangan untuk melakukan perceraian	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat pemberitahuan adanya gugatan cerai b. Usul unit c. BAP d. Relas dari Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri 	
14.	Perbaikan tanggal/ tahun kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> a. Usul unit b. Permohonan dari yang bersangkutan c. Asli SK CPNS d. Asli Ijazah SD sampai ijazah terakhir e. Asli akte kelahiran 	

15.	Perubahan Nama	<ul style="list-style-type: none"> a. Usul unit b. Permohonan dari yang bersangkutan c. Surat keterangan dari Gubernur tentang perubahan nama 	
16.	Cuti Di luar Tanggungan Negara (CDITN)	<ul style="list-style-type: none"> a. Usul unit b. Permohonan yang bersangkutan c. SK CPNS dan SK Pangkat terakhir d. Surat pernyataan e. Surat penugasan suami/ isteri f. Akta Nikah g. Kartu Keluarga h. Pernyataan dari Kelurahan -- ahli waris 	<p>Bagi yang ikatan dinas Alasan CDITN mendampingi suami/ isteri } mengurus warisan</p>